

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN DI KECAMATAN MOROTAI  
SELATAN BARAT**

**Oleh  
Alfrits Labage**

**090813224**

***Abstrak***

*Infrastruktur atau prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan system infrastruktur khususnya dalam bidang pendidikan lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat sulit dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur pendidikan merupakan basik determinant untuk menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif.*

*Pemerintah kabupaten Pulau Morotai terlebih khusus pemerintah Kecamatan Morotai Selatan Barat diharapkan agar konsisiten dalam mewujudkan cita-cita mulia dari pendidikan, yakni mencerdaskan anak bangsa Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Karena tidak hanya orang kaya atau yang punya kekuasaan saja yang bisa menikmati pendidikan, tetapi semua anak berhak dan harus mendapatkan pendidikan. Disisi lain, dalam menilai peran pemerintah yang masih terlibat monopoli, otoriter, sentralistis, dan sering melakukan kekerasan struktural dalam ruang pendidikan, sudah seharusnya dikritik dan dikoreksi oleh masyarakat dengan pandangan yang konstruktif.*

**KEY WORDS:** *Infrastruktur, kesejahteraan sosial, pendidikan.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah kabupaten Pulau Morotai terlebih khusus pemerintah Kecamatan Morotai Selatan Barat diharapkan agar konsisiten dalam mewujudkan cita-cita mulia dari pendidikan, yakni mencerdaskan anak bangsa Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang. Karena tidak hanya orang kaya atau yang punya kekuasaan saja yang bisa menikmati pendidikan, tetapi semua anak berhak dan harus mendapatkan pendidikan. Disisi lain, dalam menilai peran pemerintah yang masih terlibat monopoli, otoriter, sentralistis, dan sering melakukan kekerasan struktural dalam ruang pendidikan, sudah seharusnya dikritik dan dikoreksi oleh masyarakat dengan pandangan yang konstruktif.

Bahwa rekonstruksi nilai-nilai pendidikan dan upaya mempertegas peran Pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan tidak lain adalah satu langka yang mestinya didorong dengan seksama oleh partisipasi masyarakat Kecamatan Morotai Selatan Barat. Wajah pendidikan dalam implementasi otonomi daerah juga hingga saat ini terbukti belum dapat memberikan jaminan atas terlahirnya pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Demikian pula sistem dan pengelolaan pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat di pastikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, beberapa bagian diantaranya adalah menyangkut dengan pembangunan infrastuktur pendidikan sebagai fasilitas yang memberikan percepatan pendidikan bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerataan pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat bagi seluruh lapisan masyarakat, merupakan upaya yang perlu diberikan apresiasi positif, bukan pemerintah terjebak sehingga mengambil tindakan untuk memindahkan atau memberikan masalah pendidikan dari pemerintah secara Nasional ke pemerintah Daerah, atau dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah di Kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, lebih khusus pemerintah Kecamatan Morotai Selatan Barat, diharapkan agar bisa secara konsisten melakukan perbaikan pembangunan pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur pendidikan di sekolah. Pendidikan untuk semua (*Education For Everyone*) menjadi impian semua masyarakat yang ada di Kecamatan Morotai Selatan

Barat, dan mestinya dapat terlaksana dengan adil, dengan di dukung berbagai fasilitas yang memadai, seperti bangunan sekolah, ruang kelas yang cukup dan terlebih juga guru-guru yang professional sehingga mutu pendidikan di kecamatan morotai selatan barat lebih berkualitas. Sedangkan Berbicara pendidikan secara universal sudah pasti membutuhkan konsentrasi dan keseriusan tersendiri dari semua pihak, dengan begitu perlu ada spesifikasi agar bisa memperjelas fokus serta target dari penelitian yang dilakukan penulis. Berbagai pendekatan dan metode telah dilakukan dalam tiap pelaksanaan riset ilmiah, dari para penulis atau peneliti lainnya, kondisi demikian menjadi suatu ukuran yang di fungsikan patokan dalam mewujudkan hasil dari penelitian yang akurat dan berbobot. Pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat yang menyatuh dengan proses pembangunan infrastruktur pendidikan yang ada di Kecamatan Morotai Selatan Barat akan menjadi perhatian penulis kali ini, sehingga disaat melakukan identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan pendidikan secara umum, dapat dilakukan secara teratur.

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas penulis lebih tertarik mengangkat judul tentang *"Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Di Kecamatan Morotai Selatan Barat"*

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pendidikan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah atau dalam pengambilan keputusan dapat memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan. Menyertakan masyarakat dalam proses pembangunan

juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sebagai perwujudan proses politik yang demokratis. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengembangan masyarakat atau pembangunan infrastruktur pendidikan.

Menurut informan yang berinisial S.W menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur pendidikan di Kecamatan Morotai Selatan Barat sangat kurang, ketidak tahuan masyarakat menjadi alasan utama dan juga karna factor situasi dan kondisi.

## **B. Faktor-Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi akan efektif dan berjalan dengan baik jika tujuan partisipasi tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa ada 5 (lima) kondisi yang mendorong partisipasi.

1. Isu atau kegiatan dianggap penting bagi masyarakat
2. Kegiatan yang dilakukan membawa perubahan
3. Pendidikan dan keterampilan
4. Pengakuan atas beberapa bentuk partisipasi
5. Masyarakat berpartisipasi didukung oleh suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk berpartisipasi.
6. Kesetaraan dalam struktur dan proses

## **C. Faktor-Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat.**

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat
2. Pengaruh budaya asing yang mempengaruhi adat istiadat masyarakat di Kecamatan Morotai Selatan Barat
3. Tingkat Penghasilan Penduduk Yang Rendah

**PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

1. Timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur terlebih khusus di bidang pendidikan, bukan hanya muncul dan tumbuh begitu saja, tetapi ada berbagai macam factor pendorong, seperti isu atau kegiatan yang dianggap penting bagi masyarakat, kegiatan yang dilakukan membawahkan perubahan, factor situasi dan kondisi, dan kesetaraan dalam struktur dan proses.
2. Partisipasi dari masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh keterampilan, pendidikan, pekerjaan, dan percaya diri dari masyarakat sendiri. Banyak masyarakat yang mengurungkan diri untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena kurangnya keterampilan, pendidikan, dan kepercayaan terhadap diri sendiri, serta factor kesibukan karena pekerjaan.

## **B. Saran**

1. Dalam meningkatkan pembangunan, sangat perlu untuk dapat melibatkan masyarakat, maka dengan demikian akan tercipta suatu kinerja yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggung jawab atas pembangunan tersebut yang dilaksanakan secara bersama-sama.
2. Disamping itu juga pemerintah kecamatan harus lebih jeli dalam melihat kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, terlebih khusus di bidang pendidikan. Untuk itulah pemerintah kecamatan harus terus melakukan hal-hal yang menurut masyarakat itu baik dan dapat menyerap setiap aspirasi yang mereka sampaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Khairuddin H, Drs, 1992, *Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi Dan Perencanaan*, liberty, Yogyakarta.
- Kodoatie, 2003, *Manajemen Dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka belajar, Semarang.
- Moleong, Lexy. 2006, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.

- Mustopadidjaja AR, 2001, *Studi Kebijakan Perencanaan Dan Perkembangannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Lembaga FE-UI. Jakarta.
- Moh, Yamin, 2009, *Menggugat Pendidikan Indonesia Belajar*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Murtopo . Ali .1974 , *Strategi Politik Nasional* . CSIS . Jakarta.
- Mifta, Thoha, MPA, *Birokrasi dan Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Napitupulu, W.P, 1988, *Dimensi-dimensi Pendidikan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Nugroho Dan Rochimin, 2004, *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi Sosial Dan Lingkungan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 2002, *Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. PT. Gramedia Jakarta.
- Poerdaminta WJS, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sarbini Sumawinata, 1980, *Revolusi Kebudayaan Untuk Pembangunan*, pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Solihin ,2006, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Suryaningrat Bayu, Drs, 1989, *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Sugiyono. Prof. Dr. 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta ; Bandung.
- Siagian, Sondang P., MA., 1983, *Adinistrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Suryabrata Sumadi, 1998, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persda, Jakarta.
- Susanto Hatta, dkk., 2000, *Menggeser Pembangunan, Memperkuat rakyat: Emansipasi dan Demokrasi Mulai dari Desa*, LAPERA Pustaka Utama, Jakarta.
- Susanto ,AS, 1984, *Sisiologi Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sumaryadi ,2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.

The Liang Gie, 1995, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tjokromidjoyo, Bintoro. 1984, *Perencanaan Pembangunan. Gunung* Agung. Jakarta.

Yamin, Mohammad, *Menggugat Pendidikan Indonesia*; belajar dari paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009

**Sumber-sumber Lain :**

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

B.N. Marbun, SH, *Kamus Politik Edisi Revisi 2007*, Pustaka Sinar Harapan, anggota IKAPI, Jakarta, 2007